

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Adnyani, S. (2021) *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal - Rajawali Pers*. (n.p.): PT. RajaGrafindo
- Adrian ,S., S. H. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Agung, A. A., Soenaryo, F. X., & Sidemen, I. B. (1984). *Sejarah sosial bali kota singaraja*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Ambarwati, L., Indriastuti, A. K., Sari, N. (2018). *Pejalan kaki riwayatmu dulu dan kini*. Indonesia: UB Press.
- Eviany, E. and Sutiyo., S.S.T.P. (2023) *PERLINDUNGAN MASYARAKAT*: Hastiadi, F.F. (2023) *Celoteh Kebijakan*. Universitas Indonesia Publishing.
- Liberthin, P. (2023) *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka. Indonesia: Yudhistira.Persada.
- Muhammad, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. *Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Mulyadi, D. (2015) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Narbuko, C., Achmadi, A.(2015) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Permadi, G. (2007). *Pedagog kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Salim & Nurbani (2014) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santosa, H. (2021) *Penceritaan Visual Kawasan Urban : Teori, Strategi dan Perencanaan Landscap Visual Planning System*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi suatu pengantar (Revisi)*. Raja Grafindo Persada.

- Sri, M. (2017) *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Abdi Sitematika.
- Subarsono, A.(2022).*AnalisisKebijakanPublik*,Yogyakarta:PustakaPelajar
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susdarwanto, E., & Susdarwono, E. T. *Satpol PP: Organisasi Perangkat Daerah Penegakkan Perda dan Perkada*. Guepedia.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)*
- Syawaludin, M. (2017) *Siasat Pedagang Kaki Lima*. Palembang: CV Amanah.
- Van Praag, M. (2017). *Algemeen Nederlands Administratief Recht*. In D. R. HR, *Hukum Administrasi Negara* (p. 198). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, U. (2022) *Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.
- Widodo,Joko.(2021).*AnalisisKebijakanPublik*.Malang:MediaNusaCreative.Winar  
no,Budi.(2007).*KebijakanPublik:Teori&Proses*.Yogyakarta:MediaPresino.

#### **ARTIKEL ELEKTRONIK**

- Adnyani, N. K. S., Agustini, D. A. E., & Landrawan, I. W. (2024, December).  
PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDES DALAM  
PENATAKELOLAAN HUTAN DESA BAGI PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SAMBANGAN.  
*Jurnal Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*. Volume 9,  
Nomor 1 (hlm. 77-84).
- Ardiata, A., & Triputro, R. W. (2023). Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I.  
Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis. *The Journalish: Social and  
Government*. Volume 4, Nomor 2 (hlm. 223-234).
- Azhari, D. (2017). Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas Dan Pasar  
Bawah Kota Bukittinggi, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Volume 4, Nomor 1 (hlm. 1- 12)

- Cahyaningsih, D., & Tantri (2020) “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 6, Nomor 2 (hlm. 1-16)
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*. Volume 4, Nomor (hlm. 33-42).
- Evi, L., & Rian, D. (2020). Analisis kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota magelang dalam penanganan pedagang kaki lima. *JEMI (Jurnal STEI Ekonomi)*. Volume 29, Nomor 2 (hlm.78-87).
- Hasrul, M. (2017). Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Jurnal Amanna Gappa*. Volume 25, Nomor 2 (hlm.60-69).
- Indirakirana, A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Volume 5, Nomor 2 (hlm. 414-430).
- Katrunida, D. (2018) “Strategi Pengembangan Sentra Pedagang Kaki Lima dan Taman Bermain Sebagai Ruang Publik Menurut Persepsi Stakeholder di Sepanjang Koridor Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot”, *Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang*. Volume 1, Nomor 1. (hlm. 1-14).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 48, Nomor 2 (hlm.147-163).
- Mertada, G. R., & Mandala, S. (2016). Penerapan Ketertiban Umum Khususnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja. *Kertha Widya*. Volume 4 , Nomor 2 (hlm. 71-88).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sain*. Volume 6, Nomor 1 (hlm. 50-58).
- Purnawan, K., & Surata, I. N. (2015). Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, Volume 3, Nomor 2 (hlm. 1-12)
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Volume 6, Nomor 1 (hlm. 282-292).
- Rhitti H. dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016) Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 2 (hlm. 263-276).
- Sari, P. (2023) "Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia". *Jurnal Of Economic Education*. Volume 2, Nomor 1 (hlm. 408-421).
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*. Volume 18, Nomor 2 (hlm. 1-16).
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Volume 4, Nomor 4. (hlm.1-15).
- Supriatna, D. (2021). Penataan pedagang kaki lima (pk1) oleh satpol pp dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada pasar tanjungsari kecamatan tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*. Volume 3, Nomor 1 (hlm. 79-97).
- Thesia, E. H., Novana V., & Kareth J. (2017), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan di Trotoar Jalan di Kota Jayapura," *Jurnal Crepido* Volume 4, Nomor 1. (hlm. 28-32).
- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law), *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Volume 47, Nomor 2 (hlm.151-182).

Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Volume 3, Nomor 1. (hlm. 23-36).

#### **ARTIKEL DALAM INTERNET**

Balipost.(2024) *Ribuan Penduduk Nonpermanen Masuk Buleleng Tiap Tahun*.  
*Balipost.com*. <https://www.balipost.com/news/2024/05/08/399281/Ribuan-Penduduk-Nonpermanen-Masuk-Buleleng...html>

Choirul, A. (2023) *Pedagang kaki lima pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentas kemiskinan*, *Kumparan.com*.  
<https://kumparan.com/choirul-anam-1684127032767662890/pedagang-kaki-lima-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentas-kemiskinan-20SUOfRcbcq/full>

Dwi, D. (2023) *ukumnya Pakai Jalan dan Trotoar untuk Berjualan*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-pakai-jalan-dan-trotoar-untuk-berjualan-lt5a4f43fc74cf1/>

Krizia, P. (2019) *ada aturan lebih tinggi yang melarang PKL berjualan di trotoar*,  
*ekonomi.bisnis.com*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/45/1149212/ada-aturan-lebih-tinggi-yang-melarang-pkl-berjualan-di-trotoar>.

Sari, N. (2019) *Aturan Kementerian PUPR, PKL Boleh Berjualan di Trotoar yang Lebar nya 5 Meter*, *megapolitan.kompas.com*.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/17290951/aturan-kementerian-pupr-pkl-boleh-berjualan-di-trotoar-yang-lebar-nya-5?page=all>.

Suparta, K. (2015) *Desa Adat Buat Aturan Jual Tanah*,  
<https://bali.antaranews.com/berita/78008/desa-adat-buat-aturan-jual-tanah>

## **SKRIPSI**

Arthadana, M.W. (2019) *Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Toko Modern Di Wilayah Kabupaten Buleleng Di Tinjau Dari Perda No 10 Tahun 2013*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Sastrawan, I. G. B. (2023). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Provinsi Bali*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 2004 tentang jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444. Sekretasi Negara. Jakarta.

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Nomor 291. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 6. Pemerintah Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 3 Tahun 2024 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 3. Pemerintah Kabupaten Buleleng.

